PEMERINTAH
KABUPATEN
NGANJUK

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2025-2029

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, perlu adanya penjabaran secara operasional dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
15. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
16. Hasil (*outcome*) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu *output*/keluaran.
17. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.
18. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

20. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
22. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
26. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang memuat memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI BESERTA URAIAN

Pasal 3

(1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah, terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN;
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
BAB V PENUTUP.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;
oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;

tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan penyusunan rencana pembangunan Daerah; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, atau perubahan kebijakan nasional.
(3) Tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berkenaan dengan telah terpilihnya Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md, S.E., S.H., M.M., M.BA. dan Trihandy Cahyo Saputro, S.T. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2025-2030 yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 untuk menentukan penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dalam penyusunan renstra ini tetap memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Nganjuk, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra BPKAD memperhatikan:

(a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
(b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2024;
(c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2024 dalam pencapaian hasil *(outcome)*;
(d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
(e) kebijakan nasional;
(f) regulasi yang berlaku; dan
(g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 meliputi:

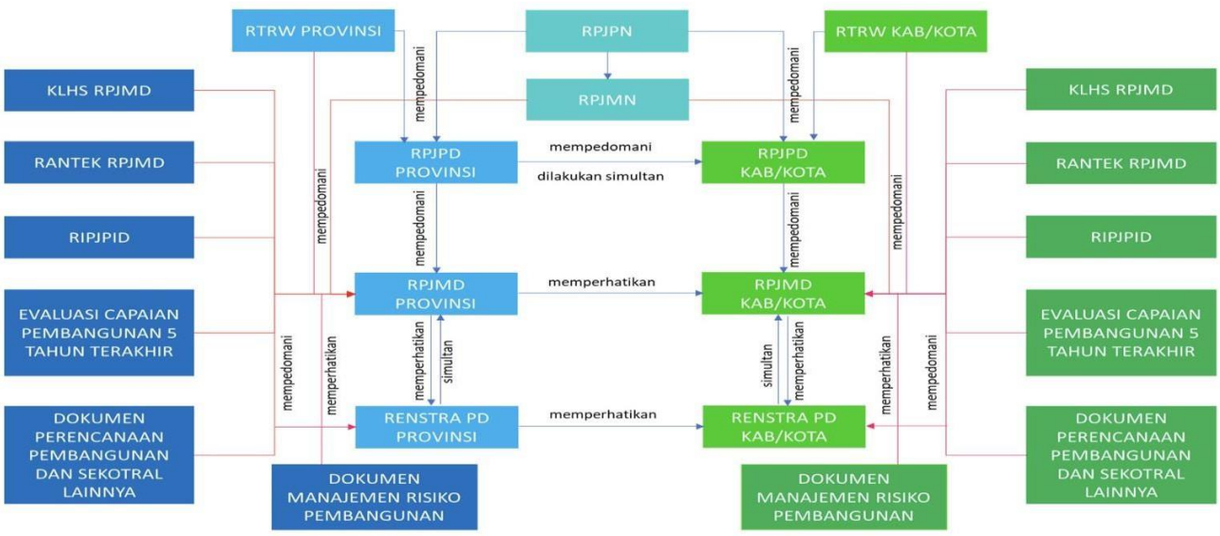
(1) persiapan penyusunan Renstra BPKAD;
(2) penyusunan rancangan awal Renstra BPKAD;
(3) penyusunan rancangan Renstra BPKAD;
(4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
(5) perumusan rancangan akhir Renstra BPKAD; dan
(6) penetapan Renstra BPKAD.

Dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)* melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Renstra BPKAD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra BPKAD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), dan Renstra BPKAD Provinsi. Dalam penyusunan Renstra BPKAD berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra BPKAD Provinsi. Kemudian Renstra BPKAD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja

BPKAD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019;Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2021-2041;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menyelaraskan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Nganjuk;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD Kabupaten Nganjuk;
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan BPKAD Kabupaten Nganjuk, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1. GAMBARAN PELAYANAN
  - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
  - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
  - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
  - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan;
  - 2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan (apabila ada);
  - 2.1.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (apabila ada);
  - 2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah (apabila ada);

- 2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
2.2.2. Isu Strategis.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
3.2. Kerangka Logis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan
3.3. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024- 2026.
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset

b. Fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset ;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
d. pelaksanaan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) bendahara umum daerah (BUD); dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

3. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan

kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas dibidang pengelolaaan keuangan dan aset.

1. Sekretariat

   Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sekretariat mempunyai fungsi :

   - Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
   - Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   - Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
   - Pembinaan aparatur;
   - Pengelolaan urusan kepegawaian;
   - Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
   - Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
   - Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
   - Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugasnya.

   Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

   a) melaksanakan urusan persuratan;
   b) melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
   c) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
   d) melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
   e) melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan

aparatur dan administrasi jabatan fungsional

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasir, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran daerah.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA)/dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan rencana kerja dan anggaran perubahan(RKAP)/(DPPA SKPD dan PPKD;
c. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
d. Penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD, peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;
e. Penyusunan regulasi bidang anggaran;
f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas

mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kebijakan bidang perbendaharaan.

Bidang perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
b. pengkoordinasian penatausahaan keuangan daerah;
c. pengkoordinasian pengelolaan dana transfer;
d. pengkoordinasian pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana (SP2D);
e. pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah membayar (SPM) yang telah diverifikasi oleh PPK SKPD dan penerbitan SKPP;
f. pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
g. pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
h. pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD;
j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbendaharaan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Akuntansi Dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis akuntansi dan

pelaporan keuangan serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
b. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c. pengoordinasian kegiatan penyusunan racangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
e. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
f. pelaksanaan proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
h. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
j. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:

   a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sebagai bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik daerah;
   b. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidangpengelolaan barang milik daerah;
   c. pengelolaan administrasi kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
   d. mengkoordinasi dan menyiapkan standar harga dan standar barang;
   e. penyusunan dan mengusulkan pengurus barang dan penyimpan barang perangkat daerah;
   f. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada pengelola barang;
   g. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah kepada pengelola barang;
   h. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
   i. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada

pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

j. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;

k. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu pengelola barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;

l. pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari pengguna barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada bupati melalui pengelola barang, serta barang milik daerah yang berada pada pengelola barang;

m. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka mengamankan dan memelihara barang milik daerah;

n. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;

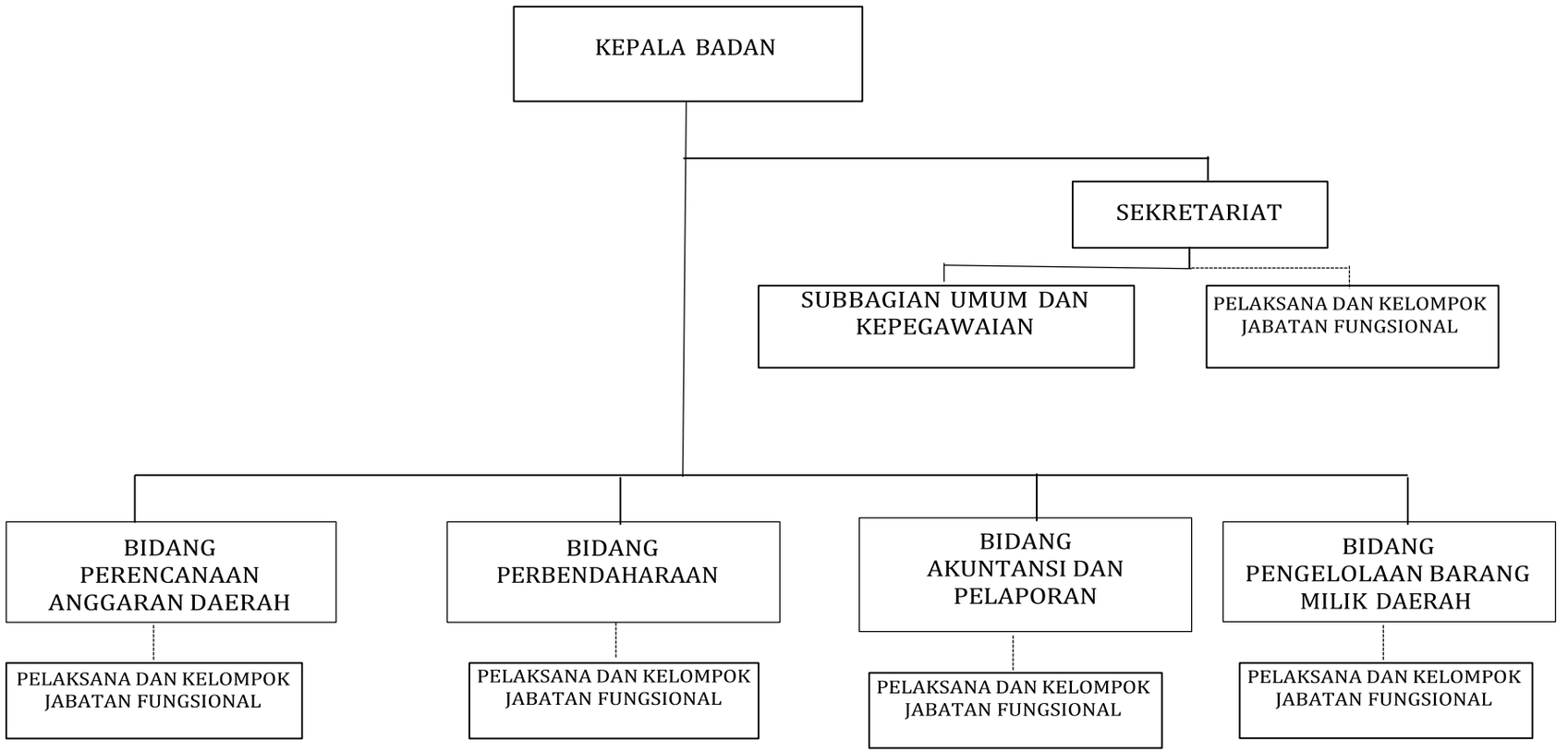
o. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan barang milik daerah;

p. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka menyusun laporan barang milik daerah;

q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan barang milik daerah; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1 Struktur Organisasi



Sumber : Perbup No 6 Tahun 2022

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi baik secara administrasi maupun operasional pada BPKAD Kabupaten Nganjuk perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Nganjuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 43 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

No	Golongan/Ruang	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	1	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	-	1	1
3.	Pembina (IV/a)	2	1	3
4.	Penata Tingkat I (III/d)	4	7	11
5.	Penata (III/c)	1	-	1
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	6	7
7.	Penata Muda (III/a)	2	3	5
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4	3	7
9.	Pengatur (II/c)	-	1	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	1
11.	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
12.	PPPK Kelas VII	-	1	1
13.	PPPK Kelas V	2	1	3
	Jumlah	**18**	**25**	**43**

Sumber Data : DUK 01 Agustus 2025

b. Pegawai menurut pendidikan formal adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S 2 – Pasca Sarjana	8

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
2.	S 1 – Sarjana	17
3.	Diploma III	8
3.	SLTA	10
	Jumlah	**43**

(Sumber Data: DUK 01 Agustus 2025)

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

No	Eselonisasi	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Badan – Eselon II b	1
2.	Sekretaris – Eselon III a	1
3.	Kepala Bidang – Eselon III b	3
4.	Kepala Subbagian-Eselon IV	1
	Jumlah	**6**

(Sumber Data: DUK 01 Agustus 2025)

Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKAD tentunya perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPKAD adalah sebagai berikut:

a. Gedung dan Kantor

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk, pasal 17 Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertempat di Jalan Brantas, Babadan, Kelurahan Werungotok, Kabupaten Nganjuk dan menempati sebuah gedung dan sebuah gudang penyimpanan aset daerah.

b. Alat-alat Angkutan

Sarana kendaraan operasional yang digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Nganjuk menurut Buku Inventaris Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

No.	Pemakai	Jenis kendaraan		Jumlah
		Roda 4	Roda 2	
1.	Pejabat Eselon II	-	-	-
2.	Pejabat Eselon III	4	-	4
3.	Pejabat Eselon IV / Fungsional	-	12	12
4.	Operasional BPKAD	2	-	2
	Jumlah	**6**	**12**	**18**

Sumber : Buku Inventaris Tahun 2024

c. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Selain gedung kantor dan kendaraan operasional yang mendukung, sarana dan prasarana lain yaitu peralatan dan perlengkapan kantor yang lengkap dan memadai juga sangat mendukung kelancaran tugas. Dari sebagian peralatan dan perlengkapan kantor yang menjadi tanggung jawab BPKAD sampai saat ini kondisinya relatif masih bagus.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah mulai dari proses pertanggung jawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset daerah,

serta pembinaan pengelolaan aset daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra BPKAD periode sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke						Realisasi Capaian SKPD Tahun ke							Rasio Capaian SKPD Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan R. APBD		WTP		100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
2	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi				100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
3	Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D				100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
4	Persentase Laporan Barang Milik Daerah OPD yang Tervalidasi				100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
5	Persentase OPD yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Standar				-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	94

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-24						Realisasi Capaian SKPD Tahun ke							Rasio Capaian SKPD Tahun ke				
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	%	%	%	%	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
6	Persentase OPD yang Menerapkan pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar		WTP		-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra BPKAD 2018-2023 Kabupaten Nganjuk dan LKJIP BPKAD Tahun 2020-2024

Dari tabel 2.6 dapat di interpretasikan bahwa pencapaian kinerja pelayanan di BPKAD untuk sasaran " Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah " dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menghasilkan nilai capaian rata-rata 99% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tercapai**".

Sedangkan untuk sasaran " Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aset Daerah "dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menghasilkan nilai capaian 100% berdasarkan skala ordinal, sehingga predikat pencapaian sasaran yang diperoleh termasuk dalam kategori "**tercapai**".

Dalam perubahan rancangan renstra tahun 2018-2023 sesuai amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ada **perubahan program dan indikator subkegiatan** pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk seperti yang tersaji dalam tabel 2.7

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Kabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (dlm jutaan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dlm jutaan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realiasasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	SEBELUM PERUBAHAN			-	-				-	-				-	-			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SESUDAH PERUBAHAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	712	7.339	8.738	9.135	7.640	674	6.212	7.109	8.211	6.981	93%	85%	81%	90%	91%	1,9%	0,43%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.033	460.863	470.109	496.440	441.653	2.539	439.784	423.012	474.211	426.149	84%	95%	90%	96%	96%	32%	44%
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	924	768	2.937	2.322	2.107	840	572	1.787	1.468	1.614	89%	75%	61%	63%	77%	0,30%	0.19%

Sumber: LKJIP BPKAD Tahun 2020-2024

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing- masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.8
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari tabel 2.8 diatas dapat di interpretasikan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat terselesaikan dengan baik dengan kategori predikat capaian kinerja "**Sangat Tinggi**". Hal ini sangat berpengaruh pada kinerja pelayanan BPKAD. Pengelolaan pendanaan pelayanan sangat ditunjang dengan sumber daya manusia yang lebih kompeten dengan mengirim/mengikutsertakan personil BPKAD dalam kegiatan peningkatan kapasitas melalui sosialisasi peraturan perundang- undangan serta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Selain itu dalam pengelolaan aset daerah, BPKAD lebih intens melaksanakan penatausahaan, inventarisasi dan pengamanan barang milik daerah berupa kegiatan pensertifikatan aset tanah pemerintah daerah.

Dalam perubahan rancangan renstra tahun 2018-2023 terdapat **perubahan uraian program** yang diampu BPKAD Kabupaten Nganjuk sebagaimana amanat Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

BPKAD sebagai salah satu perangkatdaerah tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kelompok sasaran layanan yang diberikan oleh BPKAD pada Perangkat Daerah lainnya guna koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan dan aset daerah.

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset bagi perangkat daerah, BPKAD Kabupaten Nganjuk memiliki mitra kerja yaitu Bank Jatim. Wujud dari kerjasama antara BPKAD dengan Bank Jatim sebagai satu-satunya bank yang menampung pendapatan, belanja dan pembiayaan serta segala transaksi keuangan bagi ASN di Kabupaten Nganjuk dan Bank Mandiri dalam bentuk penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk keperluan belanja.

2.2. Permasalahan Pelayanan dan Penentuan Isu-isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Komitmen	Kurangnya komitmen serta apresiasi OPD dalam pengelolaan keuangan mulai dari penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah antara lain ketidakpatuhan dalam penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	Pemberian kode rekening pada rincian obyek yang masih belum tepat Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan
2	Ketentuan Perundangan	Adanya ketentuan perundangan yang tumpang tindih terutama tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada fasilitas	FasilitasKesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dana kapitasi BPJS dan dana BOS yang Penyalurannya tidak melalui RKUD

		Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS / BOP	
3	Tertib Administrasi	Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kab. Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb) serta sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset tanah	Barang inventaris di SKPD yang belum tertib pelaporannya Belum terklasternya persyaratan pengajuan sertifikat aset milik Pemda seperti program PTSL Belum tertibnya persyaratanuntuk pensertifikatan tanah- tanah SD yang menempati TKD.
		Optimalisasi Pelayanan SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)	Koordinasidengan bank terkait apabila terjadi gangguan terkait KKPD dan Pusdatin Kemendagri bilamana adagangguan teknis/jaringan SIPD.

Dari pemetaan permasalahan diatas maka dapat di simpulkan permasalahan dan isu strategis yang di hadapi.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya komitmen OPD dalam penyusunan dokumen pengganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban uang persediaan yang dikelola sehingga penyerapan anggaran cukup rendah;
2. Pemahaman terhadap tupoksi masing-masing pengelola keuangan di SKPD masih kurang. Kondisi ini dikarenakan ketentuan perundangan yang tumpang tindih terutama tentang penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD khususnya pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk dana kapitasi BPJS dan satuan pendidikan negeri untuk dana BOS dan BOP untuk swasta;
3. Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb)
4. Optimalisasi Pelayanan SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis disusun dengan mempertimbangkan Gambaran Layanan dan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah yang ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran BPKAD Tahun 2025 -2029.

Ada beberapa hal yang diharapkan dalam 5 (lima) kurun waktu kedepan oleh BPKAD berdasarkan sasaran dan tujuan yaitu :

1. Penguatan kapasitas, komitmen serta sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset OPD.
2. Penyusunan dan implementasi standart pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Percepatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi

TABEL 2.10. TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS DAERAH

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	REGIONAL	NASIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indikator utama yang belum mencapai hasil maksimal, seperti indeks reformasi birokrasi dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang masih berada pada kategori BB.		Adanya Prinsip yang berkembang bahwa sebuah pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu, baik itu produk, layanan, atau	Isu strategis Pemeritah Provinsi Jawa Timur yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik	Transformasi Tata Kelola dengan Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal

			teknologi, pada dasarnya merupakan bentuk layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

BPKAD Kabupaten Nganjuk sebagai OPD yang berperan penting dalam pembangunan memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja. Tujuan dan sasaran BPKAD Kabupaten Nganjuk merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati Kabuaten Nganjuk Periode 2025-2029. Dengan Visi "**Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat**" dan Misi 2 yaitu **Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.** Dari Visi dan Misi yang tersebut dapat di interprestasikan bahwa BPKAD Kabupaten Nganjuk mempunyai tujuan yaitu **"Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah**". Indikator dari tujuan tersebut adalah **Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).** Guna mencapai tujuan organisasi maka perlu ditentukan sasaran yang ingin dicapai yaitu **"Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah"** yang akan diimplementasikan dalam hal :

a. Meningkatnya tata kelola anggaran

   Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan peningkatan kualitas SDM.

b. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan

   Hal ini dilakukan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan.

c. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan

   Hal ini dilakukan dengan peningkatan kualitas penatausahaan keuangan dan peningkatan kualitas pelaporan.

d. Meningkatnya tata kelola aset daerah (Barang Milik

Daerah) Hal ini dilakukan dengan peningkatan kualitas penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD), Optimalisasi Pemanfaatan BMD dan Peningkatan Pengamanan BMD.

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah											
- Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Opini BPK terhadap LKPD (Predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	99	99	99	99	99	99	99	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah (Nilai)	80	80	80	80	80	80	80	

Indikator Kinerja Sasaran

Penjelasan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Opini BPK terhadap LKPD

   Definisi indikator Opini BPK terhadap LKPD adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Nganjuk merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai opini atas kewajaran Laporan Keuangan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar Akutansi pemerintahan , kecukupan pengungkapan , efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan.

   Sumber definisi : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

   Sumber data : Laporan Keuangan OPD

2. Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

   Definisi Indikator Sasaran Ketepatan pelaksanaan penganggaran daerah merujuk pada sejauh mana proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, serta kebutuhan dan prioritas masyarakat. Ini mencakup ketepatan waktu, akurasi data, efisiensi penggunaan anggaran, dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen dari rangkaian kegitan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

   Sumber data : Laporan Keuangan OPD , Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

3. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

   Definisi Indikator Sasaran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah alat ukur untuk menilai kinerja pengelolaan BMD pada suatu pemerintah daerah. Indeks ini digunakan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan tata kelola aset daerah yang efektif dan akuntabel.

   Sumber data : Laporan Barang Milik Daerah (BMD),

3.2. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah maka BPKAD menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintah daerah yang baik			
Sasaran RPJMD: Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah

Dari Tabel 3.2 dapat diinterprestasikan bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan :

Strategi dengan " Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien dan efektif".

Arah kebijakan yang dilakukan dengan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah

A. Strategi yang ingin dicapai BPKAD dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yaitu :

   “Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk menorong terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel”

   Hal ini selaras dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD 2025-2045 yaitu : Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan (pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif).

B. Selain strategi BPKAD juga menentukan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan. Adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan adalah untuk mencapai tujuan terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur manajemen keuangan dan pengembangan sistem informasi manajemen barang daerah.

Tabel 3.3

Penahapan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4	TAHAP 5
Pelaksanakan Penguatan dasar regulasi dan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas tugas dan fungsi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	Optimalisasi pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Pemantapan capaian Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan dan Aset Daerah
Optimalisasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan regulasi dan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran	Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan asset daerah	Penyempurnaan dalam pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah	Menjaga konsistensi mutu laporan keuangan pemerintah daerah	Menjaga capaian Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan dan Aset Daerah untuk kesiapan yang prima menuju arah kebijakan periode berikutnya.

3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan disusun sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan Arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 harus tetap selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirancang dalam RPJMD .

Sebagaimana Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerag Kabupaten Nganjuk yang telah sesuai dengan Operasional NSPK, Arah Kebijakan RPJMD pada Tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286	1. Penguatan Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah	Pelaksanakan Penguatan dasar regulasi dan tata kelola pengelolaan keuangan dan aset daerah	
2	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019;Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)	2. Pemantapan Transformasi Pembangunan	Peningkatan kualitas tugas dan fungsi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	

3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah		Optimalisasi pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan keuangan dan aset daerah	
4	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	
5	Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029		Pemantapan capaian Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan dan Aset Daerah	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai ditetapkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung. Sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 sebagai berikut

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
- Meningkatnya tata kelola keuangan dan kapasitas fiskal daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah				Opini BPK terhadap LKPD (Predikat)		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang disusun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD yang terlaksana	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase pemeliharaan BMD pada SKPD yang dilaksanaakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan		Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (100%)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Presentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan		Persentase Penurunan SILPA (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
				Persentase penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
				Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah			Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase penambahan nilai aset tetap 5%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	

TABEL 4.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02 - KEUANGAN					446.505.138.000,00		446.811.684.000,00		446.953.166.000,00		447.302.846.000,00		447.530.561.000,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.114.814.000,00		7.235.314.000,00		7.130.814.000,00		7.221.814.000,00		7.178.814.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,05	81	81,1	7.114.814.000,00	81,3	7.235.314.000,00	81,6	7.130.814.000,00	81,8	7.221.814.000,00	82	7.178.814.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					437.357.774.000,00		437.440.370.000,00		437.579.352.000,00		437.725.032.000,00		437.877.747.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)	100	100	100	767.155.000,00	100	805.512.000,00	100	845.788.000,00	100	888.076.000,00	100	932.480.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30	1.861.099.000,00	30	1.899.152.000,00	30	1.991.611.000,00	30	2.088.691.000,00	30	2.190.627.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5	5	5	434.729.520.000,00	5	434.735.706.000,00	5	434.741.953.000,00	5	434.748.265.000,00	5	434.754.640.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	80	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.032.550.000,00		2.136.000.000,00		2.243.000.000,00		2.356.000.000,00		2.474.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan (%)	100	100	100	2.032.550.000,00	100	2.136.000.000,00	100	2.243.000.000,00	100	2.356.000.000,00	100	2.474.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5	5	5		5		5		5		5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
TOTAL KESELURUHAN					446505138000.00		446811684000.00		446953166000.00		447302846000.00		447530561000.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02 - KEUANGAN				446.505.138.000,00		446.811.684.000,00		446.953.166.000,00		447.302.846.000,00		447.530.561.000,00		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.114.814.000,00		7.235.314.000,00		7.130.814.000,00		7.221.814.000,00		7.178.814.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	80,05	81,1	7.114.814.000,00	81,3	7.235.314.000,00	81,6	7.130.814.000,00	81,8	7.221.814.000,00	82	7.178.814.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				96.400.000,00		96.400.000,00		96.400.000,00		96.400.000,00		96.400.000,00		
Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	96.400.000,00	4	96.400.000,00	4	96.400.000,00	4	96.400.000,00	4	96.400.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17.600.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00		17.600.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	17.600.000,00	5	17.600.000,00	5	17.600.000,00	5	17.600.000,00	5	17.600.000,00		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		10.800.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00	1	10.800.000,00		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00		11.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00	1	11.700.000,00		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		16.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	16.500.000,00	4	16.500.000,00	4	16.500.000,00	4	16.500.000,00	4	16.500.000,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.800.000,00		19.800.000,00		19.800.000,00		19.800.000,00		19.800.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	3	19.800.000,00	3	19.800.000,00	3	19.800.000,00	3	19.800.000,00	3	19.800.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.206.914.000,00		5.206.914.000,00		5.206.914.000,00		5.206.914.000,00		5.206.914.000,00		
Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	46	5.206.914.000,00	46	5.206.914.000,00	46	5.206.914.000,00	46	5.206.914.000,00	46	5.206.914.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	17		17		17		17		17			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.194.414.000,00		5.194.414.000,00		5.194.414.000,00		5.194.414.000,00		5.194.414.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	46	46	5.194.414.000,00	46	5.194.414.000,00	46	5.194.414.000,00	46	5.194.414.000,00	46	5.194.414.000,00		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	17	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00	17	5.000.000,00		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang disusun	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00		
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				374.000.000,00		339.000.000,00		339.000.000,00		384.000.000,00		344.000.000,00		
Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	60	374.000.000,00	0	339.000.000,00	0	339.000.000,00	60	384.000.000,00	0	344.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				35.000.000,00		0,00		0,00		40.000.000,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	60	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	60	40.000.000,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00	4	9.000.000,00		
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	150	25.000.000,00	150	25.000.000,00	150	25.000.000,00	150	30.000.000,00	150	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	150	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				278.000.000,00		288.000.000,00		307.500.000,00		317.500.000,00		329.500.000,00		
Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	278.000.000,00	3	288.000.000,00	3	307.500.000,00	3	317.500.000,00	3	329.500.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	0		0		0		0		0			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	7.500.000,00	6	7.500.000,00	6	7.500.000,00		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				6.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	10.000.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	36	170.000.000,00	36	180.000.000,00	36	190.000.000,00	36	200.000.000,00	36	210.000.000,00		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	200	200	15.000.000,00	200	15.000.000,00	200	18.000.000,00	200	18.000.000,00	200	18.000.000,00		
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				300.000.000,00		400.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD yang terlaksana	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	44	44	300.000.000,00	44	400.000.000,00	44	240.000.000,00	44	250.000.000,00	44	200.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	115	0		0		50		0		0			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		40.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	115	0	0,00	0	0,00	50	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000,00		400.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	44	44	300.000.000,00	44	400.000.000,00	44	200.000.000,00	44	250.000.000,00	44	200.000.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				553.000.000,00		573.000.000,00		588.000.000,00		603.000.000,00		618.000.000,00		
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3	553.000.000,00	3	573.000.000,00	3	588.000.000,00	3	603.000.000,00	3	618.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	250.000.000,00	12	260.000.000,00	12	270.000.000,00	12	280.000.000,00	12	290.000.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.000.000,00		310.000.000,00		315.000.000,00		320.000.000,00		325.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	300.000.000,00	12	310.000.000,00	12	315.000.000,00	12	320.000.000,00	12	325.000.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				297.500.000,00		323.000.000,00		344.000.000,00		355.000.000,00		375.000.000,00		
Persentase pemeliharaan BMD pada SKPD yang dilaksanaakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	297.500.000,00	1	323.000.000,00	1	344.000.000,00	1	355.000.000,00	1	375.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19		19		19		19		19			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	100		100		100		100		100			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		210.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	19	19	170.000.000,00	19	180.000.000,00	19	190.000.000,00	19	200.000.000,00	19	210.000.000,00		
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				7.500.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	7.500.000,00	10	8.000.000,00	10	9.000.000,00	10	10.000.000,00	10	15.000.000,00		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				437.357.774.000,00		437.440.370.000,00		437.579.352.000,00		437.725.032.000,00		437.877.747.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (%)	100	100	767.155.000,00	100	805.512.000,00	100	845.788.000,00	100	888.076.000,00	100	932.480.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				767.155.000,00		805.512.000,00		845.788.000,00		888.076.000,00		932.480.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase Penyajian laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (100%)	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	11	11	767.155.000,00	11	805.512.000,00	11	845.788.000,00	11	888.076.000,00	11	932.480.000,00		
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				85.141.000,00		89.398.000,00		93.868.000,00		98.561.000,00		103.489.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	11	11	85.141.000,00	11	89.398.000,00	11	93.868.000,00	11	98.561.000,00	11	103.489.000,00		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				79.142.000,00		83.099.000,00		87.254.000,00		91.616.000,00		96.197.000,00		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4	4	79.142.000,00	4	83.099.000,00	4	87.254.000,00	4	91.616.000,00	4	96.197.000,00		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				559.888.000,00		587.882.000,00		617.276.000,00		648.140.000,00		680.547.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	559.888.000,00	2	587.882.000,00	2	617.276.000,00	2	648.140.000,00	2	680.547.000,00		
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				10.245.000,00		10.757.000,00		11.295.000,00		11.860.000,00		12.453.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	2	2	10.245.000,00	2	10.757.000,00	2	11.295.000,00	2	11.860.000,00	2	12.453.000,00		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				32.739.000,00		34.376.000,00		36.095.000,00		37.899.000,00		39.794.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	150	150	32.739.000,00	150	34.376.000,00	150	36.095.000,00	150	37.899.000,00	150	39.794.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	1.861.099.000,00	30	1.899.152.000,00	30	1.991.611.000,00	30	2.088.691.000,00	30	2.190.627.000,00		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40		40		40		40		40			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.861.099.000,00		1.899.152.000,00		1.991.611.000,00		2.088.691.000,00		2.190.627.000,00		
Presentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5	5	1.861.099.000,00	5	1.899.152.000,00	5	1.991.611.000,00	5	2.088.691.000,00	5	2.190.627.000,00		
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	208	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0	2		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				405.375.000,00		425.643.000,00		446.926.000,00		469.272.000,00		492.736.000,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	405.375.000,00	2	425.643.000,00	2	446.926.000,00	2	469.272.000,00	2	492.736.000,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				414.624.000,00		435.355.000,00		457.123.000,00		479.979.000,00		503.978.000,00		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	414.624.000,00	2	435.355.000,00	2	457.123.000,00	2	479.979.000,00	2	503.978.000,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				448.168.000,00		470.576.000,00		494.105.000,00		518.810.000,00		544.751.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	448.168.000,00	2	470.576.000,00	2	494.105.000,00	2	518.810.000,00	2	544.751.000,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				492.932.000,00		517.578.000,00		543.457.000,00		570.630.000,00		599.162.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5	5	492.932.000,00	5	517.578.000,00	5	543.457.000,00	5	570.630.000,00	5	599.162.000,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0	2	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	208	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	5	5	434.729.520.000,00	5	434.735.706.000,00	5	434.741.953.000,00	5	434.748.265.000,00	5	434.754.640.000,00		
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	80	80		80		80		80		80			
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				618.691.000,00		624.877.000,00		631.124.000,00		637.436.000,00		643.811.000,00		
Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan perbendaharaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	9.000	9.000	618.691.000,00	9.000	624.877.000,00	9.000	631.124.000,00	9.000	637.436.000,00	9.000	643.811.000,00		

Dari Tabel 4.1 dapat diinterprestasikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Indikator Programnya Nilai SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain :
   1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
      b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
      d. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
      e. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
      f. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
      b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      b. Sub Kegiatan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai
      d. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	650	650		650		650		650		650			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	208	208		208		208		208		208			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	92	92		92		92		92		92			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				336.058.000,00		339.419.000,00		342.813.000,00		346.241.000,00		349.703.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	9.000	9.000	336.058.000,00	9.000	339.419.000,00	9.000	342.813.000,00	9.000	346.241.000,00	9.000	349.703.000,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				79.381.000,00		80.174.000,00		80.976.000,00		81.786.000,00		82.604.000,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	208	208	79.381.000,00	208	80.174.000,00	208	80.976.000,00	208	81.786.000,00	208	82.604.000,00		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				65.909.000,00		66.568.000,00		67.233.000,00		67.906.000,00		68.585.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	92	92	65.909.000,00	92	66.568.000,00	92	67.233.000,00	92	67.906.000,00	92	68.585.000,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				14.897.000,00		15.046.000,00		15.196.000,00		15.348.000,00		15.502.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1	14.897.000,00	1	15.046.000,00	1	15.196.000,00	1	15.348.000,00	1	15.502.000,00		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				15.211.000,00		15.363.000,00		15.516.000,00		15.671.000,00		15.828.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	650	650	15.211.000,00	650	15.363.000,00	650	15.516.000,00	650	15.671.000,00	650	15.828.000,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				107.235.000,00		108.307.000,00		109.390.000,00		110.484.000,00		111.589.000,00		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5	5	107.235.000,00	5	108.307.000,00	5	109.390.000,00	5	110.484.000,00	5	111.589.000,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				434.042.669.000,00		434.042.669.000,00		434.042.669.000,00		434.042.669.000,00		434.042.669.000,00		
Persentase penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	434.042.669.000,00	2	434.042.669.000,00	2	434.042.669.000,00	2	434.042.669.000,00	2	434.042.669.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				396.005.206.000,00		396.005.206.000,00		396.005.206.000,00		396.005.206.000,00		396.005.206.000,00		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	6	6	396.005.206.000,00	6	396.005.206.000,00	6	396.005.206.000,00	6	396.005.206.000,00	6	396.005.206.000,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		20.000.000.000,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	4	4	20.000.000.000,00	4	20.000.000.000,00	4	20.000.000.000,00	4	20.000.000.000,00	4	20.000.000.000,00		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				18.037.463.000,00		18.037.463.000,00		18.037.463.000,00		18.037.463.000,00		18.037.463.000,00		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	2	2	18.037.463.000,00	2	18.037.463.000,00	2	18.037.463.000,00	2	18.037.463.000,00	2	18.037.463.000,00		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				68.160.000,00		68.160.000,00		68.160.000,00		68.160.000,00		68.160.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00		
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				68.160.000,00		68.160.000,00		68.160.000,00		68.160.000,00		68.160.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00	100	68.160.000,00		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				2.032.550.000,00		2.136.000.000,00		2.243.000.000,00		2.356.000.000,00		2.474.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5	5	2.032.550.000,00	5	2.136.000.000,00	5	2.243.000.000,00	5	2.356.000.000,00	5	2.474.000.000,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan aset daerah yg sesuai ketentuan (%)	100	100		100		100		100		100			
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				2.032.550.000,00		2.136.000.000,00		2.243.000.000,00		2.356.000.000,00		2.474.000.000,00		
Persentase penambahan nilai aset tetap 5%	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	52	1	2.032.550.000,00	1	2.136.000.000,00	1	2.243.000.000,00	1	2.356.000.000,00	1	2.474.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	26	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	30	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	52	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	52	1		1		1		1		1			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	52	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				250.000.000,00		263.000.000,00		276.000.000,00		290.000.000,00		305.000.000,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	52	1	250.000.000,00	1	263.000.000,00	1	276.000.000,00	1	290.000.000,00	1	305.000.000,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				50.000.000,00		53.000.000,00		56.000.000,00		59.000.000,00		62.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	52	1	50.000.000,00	1	53.000.000,00	1	56.000.000,00	1	59.000.000,00	1	62.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				100.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		116.000.000,00		122.000.000,00		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00	1	116.000.000,00	1	122.000.000,00		
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				600.000.000,00		630.000.000,00		662.000.000,00		695.000.000,00		730.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	52	1	600.000.000,00	1	630.000.000,00	1	662.000.000,00	1	695.000.000,00	1	730.000.000,00		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				125.000.000,00		131.000.000,00		138.000.000,00		145.000.000,00		152.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	52	1	125.000.000,00	1	131.000.000,00	1	138.000.000,00	1	145.000.000,00	1	152.000.000,00		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				402.550.000,00		423.000.000,00		444.000.000,00		466.000.000,00		489.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	402.550.000,00	4	423.000.000,00	4	444.000.000,00	4	466.000.000,00	4	489.000.000,00		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				155.000.000,00		163.000.000,00		171.000.000,00		180.000.000,00		189.000.000,00		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	30	1	155.000.000,00	1	163.000.000,00	1	171.000.000,00	1	180.000.000,00	1	189.000.000,00		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				350.000.000,00		368.000.000,00		386.000.000,00		405.000.000,00		425.000.000,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	26	1	350.000.000,00	1	368.000.000,00	1	386.000.000,00	1	405.000.000,00	1	425.000.000,00		

e. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5) Administrasi Umum
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
   d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
   e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
   f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan
   g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
   h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD
   i. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
   b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
   b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
   c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
   d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan daerah

Indikator Programnya Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai standar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain:

1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS
   b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan KUA DanPerubahan PPAS
   c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD\Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang P. APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran P. APBD
   d. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran
   e. Sub Kegiatan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
   a. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah
   b. Sub Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian Dan Penerbitan Anggaran Kas Dan SPD
   c. Sub Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan Dan Dana Transfer Lainnya
   d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
   e. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
   f. Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban (SPJ)
3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO Dan Beban
   b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran

c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

d. Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

e. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah

f. Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

5) Pengelolaan Data Dan Implemtasi Sitem Informasi Dan Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

a. Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator Programnya Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan barang milik daerah sesuai standar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain :

1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

a. Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga

b. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

c. Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

e. Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

f. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah

g. Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah

h. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Dari uraian tabel 4.4 dapat digambarkan Program Prioritas BPKAD ikut berperan serta dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Dan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk (BPKAD) berperan dalam pencapaian misi 2 RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yaitu **Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif,partisipatif dan transparan** dan program unggulan **2 adalah Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi** dengan tema **"Tata kelola keuangan daerah".**

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
		Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BPKAD sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci mengalami perubahan dari Renstra sebelumnya, hal ini disebabkan untuk lebih menyelaraskan (lebih relevan) dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci diuraikan dalam tabel 4.5 dan 4.6 berikut :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									
2.	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah	positif	Nilai	80	80	80	80	80	80	80	
3.	Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	positif	%	99	99	99	99	99	99	99	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah dimaksud diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dimaksud diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dan berdampak, disusun dengan menggunakan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menjamin keberhasilan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 agar dipedomani dan menjaga konsistensinya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya, serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berbasis manajemen risiko pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun guna sinkronisasi dan sinergi urusan pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001